Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rezki Akbar Norrahan

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia
Email: rezkiakbaar@gmail@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: xx-xx-2024 Revised:xx-xx-2024 Published:xx-xx-2024	<i>This research explores the concept of Mudharabah Musytarakah from the perspective of Sharia economic law. Mudharabah Musytarakah is a financial instrument used in business practices based on Sharia principles. The research aims to deepen the understanding of the Mudharabah Musytarakah concept and analyze the legal aspects related to its implementation in the context of Sharia economics. This research will employ literature review, concept analysis, case studies, interviews with Sharia economists, and Sharia economic law analysis to achieve its objectives. The research results are expected to provide a deeper understanding of the Mudharabah Musytarakah concept and its contribution in the context of Sharia economic law. The research will also discuss the practical implications of using Mudharabah Musytarakah in Sharia economic practices and its potential for development in supporting an economy based on Sharia principles. With a deeper understanding of this concept, practitioners, academics, and policymakers can effectively utilize Mudharabah Musytarakah in Sharia-compliant economic practices.</i>
Keywords: Mudharabah Musytarakah Sharia Economic	

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi konsep Mudharabah Musytarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mudharabah Musytarakah adalah sebuah instrumen keuangan yang digunakan dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang konsep Mudharabah Musytarakah dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaannya dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, wawancara dengan ahli ekonomi syariah, dan analisis hukum ekonomi syariah untuk mencapai tujuannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Mudharabah Musytarakah, serta kontribusinya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penggunaan Mudharabah Musytarakah dalam praktik ekonomi syariah dan potensi pengembangannya dalam mendukung perkembangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, diharapkan praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan Mudharabah Musytarakah secara lebih efektif dalam praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat baik di tingkat nasional maupun internasional. Konsep pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah menarik perhatian banyak pihak, baik dalam konteks keuangan pribadi maupun dalam skala bisnis yang lebih besar. Salah satu instrumen yang menjadi sorotan dalam industri perbankan syariah adalah akad mudharabah musytarakah, yang memungkinkan bank syariah untuk mendukung pembiayaan usaha dan proyek berdasarkan prinsip-prinsip syariah(Norrahan, 2023a).

Menghadapi tuntutan bisnis yang semakin kompleks dan diversifikasi, banyak bank syariah mulai menerapkan konsep multi akad mudharabah musytarakah. Multi akad ini melibatkan kombinasi berbagai akad, yang memungkinkan bank dan nasabah untuk berkolaborasi dalam pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik proyek yang berbeda(Norrahan, 2023b).

Tidak bisa dipungkiri secara perkembangan zaman bahwa Hukum mengenai Ekonomi syariah semakin berkembang juga menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang dialami masyarakat. Hal ini

banyak ditandai dengan banyaknya akad yang menerapkan syariah. Salah satu kemunculan hukum yang baru adalah multi akad atau hybrid contract(Norrahman, 2023c).

Banyak lembaga keuangan dan kesadaran masyarakat juga dalam menerapkan kerja sama keuangan berdasarkan syariah salah satu contohnya Mudharabah musyarakah dan implikasinya, asuransi syariah, pasar modal, dan sebagainya.

Penerapan multi akad mudharabah musyarakah menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Kombinasi berbagai akad ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembiayaan dan pengelolaan risiko, yang merupakan kebutuhan utama dalam bisnis modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang multi akad mudharabah musyarakah dan praktik terbaiknya menjadi sangat relevan dalam konteks perbankan syariah saat ini(Norrahman, 2023d).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep multi akad mudharabah musyarakah, penerapannya dalam perbankan syariah, manajemen risiko yang terkait, keunggulan dan kelemahan, serta dampak ekonomi dan sosialnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang multi akad mudharabah musyarakah, diharapkan industri perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam perekonomian serta pembangunan masyarakat secara lebih luas.

METODE

Penelitian ini akan dimulai dengan analisis studi pustaka yang mendalam untuk mengumpulkan informasi tentang konsep Mudharabah Musyarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber yang akan digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan literatur terkait lainnya. penelitian akan fokus pada analisis konsep Mudharabah Musyarakah, termasuk aspek-aspek hukum, prinsip-prinsip syariah yang terlibat, serta peran dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini.

Studi kasus tentang implementasi Mudharabah Musyarakah dalam praktik ekonomi syariah akan dilakukan. Penelitian akan mencakup contoh-contoh transaksi yang melibatkan Mudharabah Musyarakah dan akan menganalisis peran pihak-pihak yang terlibat serta dampaknya.

Data dari studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, dan wawancara akan digunakan untuk menganalisis konsep Mudharabah Musyarakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang relevan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta implikasi ekonomi dari transaksi ini.

Kesimpulan penelitian akan merangkum temuan dan analisis yang dihasilkan dari penelitian ini. Ini akan membahas implikasi praktis dari konsep Mudharabah Musyarakah dalam hukum ekonomi syariah dan kontribusi konsep ini dalam praktik ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Definisi Akad Mudharabah musyarakah

Akad *Mudharabah musyarakah* adalah perjanjian atau kontrak dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) dalam pembiayaan usaha atau proyek bersama. Dalam akad ini, pihak bank syariah menyediakan modal (shahibul maal) sementara pihak nasabah mengelola usaha atau proyek (mudharib) dengan tujuan untuk membagi keuntungan dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya(Arifin & SH, 2021).

Dalam akad *Mudharabah musyarakah*, terdapat dua komponen utama:

1. Mudharabah: Pihak mudharib (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha atau proyek dengan menggunakan modal yang disediakan oleh bank syariah (shahibul maal). Mudharib bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari, pengelolaan usaha, dan pelaksanaan proyek.
2. Musyarakah: Musyarakah mengacu pada konsep kepemilikan bersama. Kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah, memiliki kepemilikan bersama dalam usaha atau proyek tersebut. Keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Akad *Mudharabah musyarakah* adalah instrumen yang penting dalam perbankan syariah yang memungkinkan partisipasi bersama antara pihak bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan usaha atau proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini memberikan kesempatan untuk berbagi risiko dan keuntungan, dan dapat digunakan dalam berbagai bidang bisnis dan investasi.

Akad *Mudharabah musyarakah*, yaitu perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu, ada sisi kerjasama antara satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola itu adalah *mudharabah* (Yanti, 2020). Juga disisi lain ada pihak yang berfungsi ganda selain menjadi pemodal juga sebagai pengelola. Kaidah-kaidah dalam akad *Mudharabah musyarakah* :

1. Pihak pengelola yang sekaligus juga menyertakan dananya memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
2. Keuntungan berdasarkan dengan nisbah yang disepakati.
3. Jika terjadi kecelekaan yang berakibat kerugian maka pembagian juga harus berdasarkan porsi modal.

Dalam fatwa DSN NO: 50/DSN-MUI/III/2006, *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.³

Prinsip-prinsip Syariah dalam Akad *Mudharabah musyarakah*

Prinsip-prinsip Syariah dalam Akad *Mudharabah musyarakah* adalah pedoman etika dan nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini. Prinsip-prinsip ini berdasarkan hukum Islam dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan ketidakbersalahan. Berikut adalah prinsip-prinsip Syariah yang relevan dalam Akad *Mudharabah musyarakah* (Septiatin, 2022):

1. Bagi Hasil: Prinsip utama dalam akad ini adalah pembagian keuntungan antara pihak bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pembagian keuntungan yang adil dan proporsional.
2. Bagi Risiko: Selain pembagian keuntungan, risiko juga harus dibagi secara adil. Bank syariah dan nasabah harus bersedia untuk berbagi risiko yang terkait dengan usaha atau proyek bersama. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan dalam kontrak.
3. Transparansi: Akad *Mudharabah musyarakah* harus didasarkan pada transparansi yang tinggi. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman“

Akad *Mudharabah Musyarakah*,

1. yang jelas tentang kesepakatan, keuntungan, risiko, dan peran masing-masing pihak dalam usaha atau proyek bersama.
2. Tidak Ada Gharar: Prinsip ini menekankan bahwa akad harus bebas dari unsur-unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Akad harus jelas, terperinci, dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan.
3. Larangan Riba: Akad *Mudharabah musyarakah* harus sepenuhnya bebas dari unsur bunga (riba). Pembagian keuntungan dalam akad ini harus berdasarkan hasil usaha atau proyek dan tidak boleh melibatkan pembayaran bunga atas modal.
4. Larangan Transaksi Haram: Akad ini harus mematuhi larangan atas transaksi atau kegiatan yang diharamkan dalam Islam. Transaksi dengan barang-barang haram atau aktivitas yang dilarang adalah tidak sah dalam akad *Mudharabah musyarakah*.
5. Kepatuhan Terhadap Prinsip Keuangan Islam: Bank syariah dan nasabah harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dalam pelaksanaan akad ini. Prinsip-prinsip ini melibatkan ketidakpartisan dan keberkahan dalam usaha dan investasi.
6. Prinsip-prinsip Syariah dalam Akad *Mudharabah musyarakah* memberikan dasar etis dan hukum yang kuat yang harus diikuti dalam implementasi kontrak ini. Memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah (Edriyanti, 2020).

Tujuan dan Manfaat Akad *Mudharabah musyarakah*

Tujuan utama dari Akad *Mudharabah musyarakah* dalam perbankan syariah adalah menciptakan kesempatan investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sugito dkk., 2020). Berikut adalah tujuan dan manfaat utama dari akad ini:

Tujuan:

1. Mendorong Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah: Salah satu tujuan utama dari akad ini adalah untuk menyediakan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup larangan riba dan aspek-aspek etika dalam bisnis.
2. Memfasilitasi Kemitraan Bisnis: Akad *Mudharabah musyarakah* memungkinkan bank syariah dan nasabah untuk menjalin kemitraan bisnis dalam pembiayaan proyek atau usaha. Hal ini menciptakan kerjasama yang adil antara pihak yang menyediakan modal (bank) dan pihak yang mengelola usaha (nasabah).
3. Mendorong Pembagian Risiko dan Keuntungan: Konsep pembagian risiko dan keuntungan adalah tujuan utama dalam akad ini. Bank syariah dan nasabah berbagi risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang sama.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Akad *Mudharabah musyarakah* dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama dalam pengembangan usaha kecil dan mikro serta sektor-sektor yang memerlukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Manfaat:

1. Keberlanjutan Usaha: Akad ini membantu menjaga kelangsungan usaha atau proyek dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil. Ini dapat mengurangi beban finansial pada salah satu pihak jika usaha mengalami kerugian.
2. Diversifikasi Investasi: Bank syariah dapat menggunakan akad *Mudharabah musyarakah* untuk mendiversifikasi portofolio investasinya. Ini memungkinkan bank untuk berinvestasi dalam berbagai jenis usaha dan proyek.
3. Pemberian Dana kepada Usaha Kecil dan Mikro: Melalui akad ini, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro, yang seringkali sulit mendapatkan akses ke pembiayaan konvensional.
4. Pembaruan Usaha: Nasabah yang mengelola usaha atau proyek dengan akad ini dapat memperbarui usaha mereka dengan dukungan modal bank syariah, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan usaha (Janah & Fanani, 2020).
5. Keadilan Sosial: Akad *Mudharabah musyarakah* mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dengan memungkinkan pembagian keuntungan yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata.

Tujuan dan manfaat akad ini adalah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dan investasi.

Langkah-langkah dalam Penerapan Akad

Langkah-langkah dalam Penerapan Akad *Mudharabah musyarakah*:

1. Identifikasi Peluang Usaha atau Proyek: Langkah pertama dalam penerapan akad *Mudharabah musyarakah* adalah mengidentifikasi peluang usaha atau proyek yang akan dibiayai. Ini dapat mencakup usaha mikro, kecil, menengah, atau proyek investasi tertentu (Anidar & Sartika, 2023).
2. Perjanjian Awal: Pihak bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) melakukan perjanjian awal yang mencakup berbagai aspek, seperti besarnya modal yang akan disediakan oleh bank dan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha atau proyek.
3. Rencana Bisnis: Membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci untuk usaha atau proyek yang akan dibiayai. Rencana ini mencakup estimasi pengeluaran, proyeksi pendapatan, target keuntungan, serta strategi pengelolaan usaha.
4. Kesepakatan Pembagian Keuntungan dan Risiko: Pihak bank syariah dan nasabah harus mencapai kesepakatan tentang cara pembagian keuntungan dan risiko. Ini mencakup proporsi keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan bagaimana risiko akan dibagi.

5. Akad Mudharabah: Pihak bank syariah dan nasabah melakukan akad Mudharabah yang mendefinisikan peran bank sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Ini mencakup besarnya modal yang disediakan oleh bank dan persentase keuntungan yang akan dibagikan sesuai kesepakatan.
6. Akad Musyarakah: Selain akad Mudharabah, akad Musyarakah juga dilakukan untuk menentukan kepemilikan bersama atas usaha atau proyek. Kepemilikan bersama ini mencakup hak bank syariah dan nasabah atas aset dan hasil usaha.
7. Pelaksanaan Usaha: Nasabah mengelola usaha atau proyek sesuai dengan rencana bisnis yang telah disepakati. Pihak bank syariah dapat memantau dan mengawasi pengelolaan usaha sesuai dengan peran mereka dalam akad.
8. Pengawasan dan Evaluasi: Selama periode akad, pihak bank syariah melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha atau proyek. Ini melibatkan penilaian kinerja dan kepatuhan terhadap kesepakatan akad.
9. Pembagian Keuntungan dan Risiko: Setelah usaha atau proyek menghasilkan keuntungan, pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad. Risiko yang timbul, seperti kerugian atau insiden tak terduga, juga harus dibagi sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
10. Penutupan Akad: Akad *Mudharabah musyarakah* dapat ditutup ketika usaha atau proyek telah mencapai akhir masa berlaku, mencapai target tertentu, atau dalam situasi lain yang telah disepakati sebelumnya. Penutupan akad ini melibatkan pembagian hasil akhir dan penyelesaian seluruh kewajiban.

Langkah-langkah ini membantu memastikan pelaksanaan akad *Mudharabah musyarakah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kejelasan dalam kesepakatan awal, perencanaan bisnis yang baik, dan transparansi dalam pelaksanaan merupakan kunci keberhasilan akad ini.

Keuntungan dalam Penggunaan Akad *Mudharabah musyarakah*

Penggunaan Akad *Mudharabah musyarakah* dalam perbankan syariah memberikan sejumlah keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak ini (Rosyada, 2021). Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari penggunaan akad ini:

1. Pendanaan Sesuai dengan Prinsip Syariah: Akad *Mudharabah musyarakah* memungkinkan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba dan aktivitas yang diharamkan. Ini menjadikan akad ini sebagai alternatif yang sah dalam perbankan syariah.
2. Pembagian Keuntungan yang Adil: Konsep pembagian keuntungan dalam akad ini berdasarkan kesepakatan awal, yang memastikan pembagian yang adil
 1. antara pihak bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keadilan dalam kontrak.
 2. Pembiayaan Bersama: Akad *Mudharabah musyarakah* mendorong partisipasi bersama antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan usaha atau proyek. Ini mengurangi tekanan finansial pada bank syariah dan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengelola usaha atau proyek.
3. Diversifikasi Portofolio Investasi: Bank syariah dapat menggunakan akad ini untuk mendiversifikasi portofolio investasinya. Ini memungkinkan bank untuk berinvestasi dalam berbagai jenis usaha dan proyek, yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Akad *Mudharabah musyarakah* dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama dalam pengembangan usaha kecil dan mikro serta sektor-sektor yang memerlukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ini membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Pengelolaan Risiko Bersama: Risiko dalam usaha atau proyek yang dibiayai melalui akad ini dibagi bersama antara bank syariah dan nasabah. Ini menciptakan mekanisme untuk pengelolaan risiko yang lebih efektif, sehingga risiko tidak menjadi beban hanya pada satu pihak.

6. Dukungan kepada Usaha Kecil dan Mikro: Akad *Mudharabah musyarakah* memberikan akses pembiayaan kepada usaha kecil, mikro, dan pemilik usaha yang membutuhkan modal tambahan. Hal ini dapat mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
7. Keadilan Sosial: Akad ini mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dengan memungkinkan pembagian keuntungan yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi yang lebih merata (Permana & Puspitaningsih, 2020).
8. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan Akad *Mudharabah musyarakah* sebagai instrumen yang penting dalam perbankan syariah yang mendukung
9. pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Kontrak ini menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam dunia keuangan.

Kewajiban akad *Mudharabah musyarakah* :

1. peserta berhak secara kolektif sebagai pemilik modal atau peserta secara individu sebagai shohibul mal.
2. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan
3. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.
4. Cara dan waktu penentuan besar kekayaan peserta dan kekayaan perusahaan.
5. Bagi hasil, cara, dan waktu pembagian hasil dari investasi.
6. Ketentuan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.4

Potensi Risiko dan Kelemahan yang Perlu Diperhatikan

Penggunaan Akad *Mudharabah musyarakah* dalam perbankan syariah memberikan sejumlah potensi risiko dan kelemahan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak ini. Berikut adalah beberapa potensi risiko dan kelemahan yang perlu diperhitungkan:

1. Risiko Usaha: Terdapat risiko bisnis yang terkait dengan keberhasilan usaha atau proyek yang dibiayai. Jika usaha tidak berhasil atau mengalami kerugian, bank syariah dan nasabah akan mengalami kerugian sesuai dengan proporsi kesepakatan awal. Ketidakpastian Keuntungan: Keuntungan dalam akad ini bergantung pada hasil usaha atau proyek, yang bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan (Agustiar, 2021).
2. Kesulitan dalam Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja usaha atau proyek yang dibiayai dapat menjadi sulit, terutama jika tidak ada sistem pengukuran yang jelas. Ini bisa mengakibatkan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat (Faisol dkk., 2022).
3. Potensi Konflik: Perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan antara bank syariah dan nasabah dalam pengelolaan usaha atau proyek dapat menghasilkan konflik. Konflik ini dapat memengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha.
4. Kesulitan Pengelolaan Risiko: Meskipun risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan risiko dalam praktek bisa menjadi kompleks. Ini memerlukan pemantauan, evaluasi, dan tindakan yang tepat dalam menangani risiko bisnis.
5. Biaya dan Overhead: Akad *Mudharabah musyarakah* dapat memerlukan biaya tambahan terkait dengan administrasi, pemantauan, dan pelaporan. Biaya-biaya ini harus diperhitungkan dalam perencanaan bisnis.
6. Ketergantungan pada Kepemilikan Bersama: Akad Musyarakah melibatkan kepemilikan bersama atas aset dan hasil usaha. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada keputusan bersama antara bank syariah dan nasabah.
7. Keterbatasan dalam Likuiditas: Karena akad ini melibatkan pembagian keuntungan, likuiditas mungkin menjadi terbatas dalam beberapa situasi, terutama jika usaha atau proyek mengalami kerugian (Kamaruddin, 2022).

8. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian dalam pemahaman dan penerapan hukum syariah dapat menjadi masalah dalam akad *Mudharabah musyarakah*. Interpretasi yang berbeda tentang hukum syariah dapat memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan akad.
9. Penting bagi pihak bank syariah dan nasabah untuk memahami dan mengelola risiko serta kelemahan yang terkait dengan Akad *Mudharabah musyarakah*. Ini dapat
10. mencakup penyusunan kesepakatan yang jelas, pemantauan yang cermat, dan manajemen risiko yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan dan kelangsungan akad ini dapat dijaga dengan baik.

KESIMPULAN

Akad *Mudharabah musyarakah* merupakan instrumen penting dalam perbankan syariah yang memungkinkan pendanaan usaha atau proyek berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini melibatkan bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) dalam pembiayaan dan pengelolaan bersama. Dalam kesepakatan ini, keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Melalui akad ini, berbagai manfaat dapat diperoleh, termasuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pembagian keuntungan yang adil, dan pemberdayaan ekonomi. Akad *Mudharabah musyarakah* juga memberikan peluang untuk diversifikasi investasi dan dukungan kepada usaha kecil dan mikro.

Namun, penggunaan akad ini juga membawa potensi risiko dan kelemahan, seperti risiko bisnis, ketidakpastian keuntungan, dan potensi konflik. Penting untuk memahami dan mengelola risiko ini dengan hati-hati agar akad ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, Akad *Mudharabah musyarakah* adalah instrumen yang dapat mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini dan manajemen risiko yang efektif, akad ini dapat menjadi alat yang efektif dalam perbankan syariah.

REFERENCES

- Agustiar, M. (2021). Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) pada pembiayaan perumahan. *Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi*.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/50643>
- Anidar, D., & Sartika, D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*.
<http://jurnal.utu.ac.id/jimetera/article/view/6223>
- Arifin, H. Z., & SH, M. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xLYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=mudharabah&ots=8twG7p1bzf&sig=YDK_2UY-1U-uhf73I9phh9TjrFg
- Edriyanti, R. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia). Dalam *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/86930508/pdf.pdf>
- Faisol, A., Nidar, S. R., & Herwany, A. (2022). Is Reasonable to Use Mudharabah in Sharia Pricing Assets? *ICEBE 2021: Proceedings of the* <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316790>
- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
<https://www.neliti.com/publications/315337/analisis-kepatuhan-syariah-pembiayaan-musyarakah-pada-bprs-amanah-sejahtera-gresik>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi*
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/22075>
- Norrahman, R. A. (2023a). ASPEK EKONOMI DALAM HUBUNGAN DUNIA ISLAM DENGAN EROPA SEJAK MASA PERANG SALIB. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 50–60.

- Norrahman, R. A. (2023b). IMPLEMENTASI COST PLUS PROFIT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4).
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1097>
- Norrahman, R. A. (2023c). PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 302–314.
- Norrahman, R. A. (2023d). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 104–129.
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2020). Determinan Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*.
<http://103.123.236.7/index.php/jes/article/view/2041>
- Rosyada, A. H. (2021). *Analisis Perbandingan Pembiayaan Kpr Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah Indonesia Kc* repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7656/>
- Septiatin, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen DayaSaing*.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/18137>
- Sugito, S., Wahid, N. A., & Zuhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh. *Journal of Sharia* <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/632>
- Yanti, N. S. A. (2020). Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017. *Accounting Profession Journal (APAJI)*.
<http://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/9>